

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2019**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Padang*



**Monica Luxsiana
18053114/2018**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2019**

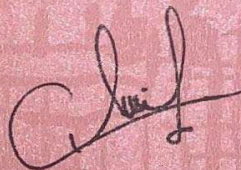
Nama : Monica Luxsiana
NIM/TM : 18053114/2018
Departemen : Pendidikan Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Koperasi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Maret 2023

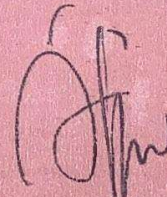
Disetujui Oleh :

Ketua Departemen Pendidikan Ekonomi

Pembimbing



Tri Kurniawati S.Pd.,M.Pd
NIP. 19820311 200501 2 005



Jean Elikal Marna S.Pd.,M.Pd E
NIDN. 001205882

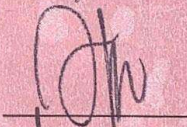
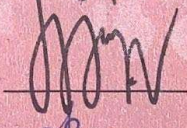
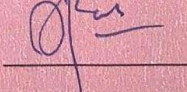
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah diPertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2019**

Nama : Monica Luxsiana
NIM/TM : 2018/18053114
Departemen : Pendidikan Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Koperasi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Maret 2023

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Jean Elikal Marna, S.Pd.,M.Pd.E	
2.	Anggota	Dr. Marwan S.Pd., M.Si	
3.	Anggota	Elvi Rahmi S.Pd.,M.Pd	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Monica Luxsiana
NIM/TM : 18053114/2018
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Penuh / 12 November 2000
Jurusan : Ekonomi Koperasi
Keahlian : Pendidikan Ekonomi
Fakultas : Ekonomi – Universitas Negeri Padang
JudulSkripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya, dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019 adalah asli karya saya sendiri;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Karya tulis (skripsi) ini sah apabila telah di tanda tangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji, dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis (skripsi) ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Maret 2023
Yang menyatakan,



Monica Luxsiana
NIM. 18053114

ABSTRAK

Monica Luxsiana (18053114) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019

Pembimbing Jean Elikal Marna S.Pd.,M.Pd.E

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019 dengan menggunakan dua analisis yaitu Analisis Deskriptif dan Analisis Induktif. Jenis data adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu menggunakan 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat dengan menggunakan pendekatan *Common Effect Model* (CEM).

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) Pendapatan asli daerah dengan nilai koefisien 0,050765 dan nilai probabilitas 0.0207 artinya pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019 (2) Dana Alokasi Umum dengan nilai koefisien 0,043421 dan nilai probabilitas 0.0635 artinya dana alokasi umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019 (3) Dana Alokasi Khusus dengan nilai koefisien -0,1287 dan nilai probabilitas 0,0000 artinya dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016- 2019 (4) Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019.

Kata kunci : pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019”**

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih secara khusus kepada Ibu Jean Elikal Marna ,S.Pd, M.Pd.E selaku Pembimbing yang telah memberikan masukan dan saran serta dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Idris, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi beserta Wakil- Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Tri Kurniawati, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Rani Sofya, S.Pd, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Univeritas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Marwan, S.Pd, M.Si selaku dosen penguji 1
5. Ibu Elvi Rahmi, S.Pd, M.Pd. selaku dosen penguji 2

6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta staf pegawai dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ekonomi yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di almamater tercinta ini.
7. Teristimewa kepada orang tua tercinta, Ayahanda Lukpramuska dan Ibunda Lismaneti serta kakak Chyntia Lisnawati S,E dan Dinda Riski Amelia yang selalu mendoakan penulis serta memberikan motivasi dan dukungan yang tiada terhingga demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat tercinta dan seperjuangan yang ada dari awal hingga sampai saat ini, Dianna Utari, Anniza Oktarizal, Ocha Warninda, Fadila Riska, Khairani Fitri, Feny Dharmawan, Intan Josi Ramadhani dan Novan Kharido yang telah memberikan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Husnul Fikri Kurniawan yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga saat ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan 2018 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang memberikan banyak motivasi dan dukungan yang sangat berguna bagi penulis.

Semoga segala bentuk bantuan dan dukungan dari segala pihak dinilai ibadah di sisi Allah SWT. Penulis menyadari dengan segala kekurangan an keterbatasan penulis, skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi penulis khususnya dan teman-teman pada umumnya.

Padang, Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL	vii
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II	13
KAJIAN TEORI	13
A. Kajian Teori	13
B. Penelitian Relevan.....	42
C. Kerangka Berpikir.....	45
D. Hipotesis Penelitian.....	46
BAB III.....	48
METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Tempat dan Waktu Penelitian	48
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	48
D. Variabel Penelitian.....	50
E. Definisi Operasional.....	50
F. Metode Pengumpulan Data.....	52
G. Populasi Penelitian.....	52
H. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV	65
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Hasil Penelitian.....	65
B. Pembahasan Hasil Penelitian	91

BAB V	102
PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Penelitian Relevan	42
Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2016-2019 (Persen)	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019 (Ribu Rupiah)	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 4. Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019 (Ribu Rupiah)	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 5 Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019 (Ribu Rupiah)	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 6. Common Effect Model (CEM)	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 7. Fixed Effect Model (FEM)	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 8. Random Effect Model (REM)	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 9. Uji Chow.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 10. Uji Hausman	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 11. Uji Langrage Multiplier	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 12. Hasil Analisis Regresi panel (common effect model)	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 13 Uji multikolinearitas	85
Tabel 14. Uji heterokedastisitas	86
Tabel 15. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 16. Uji f (simultan).....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
Tabel 17. Uji t (Uji Parsial).....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat membuat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang dapat diwujudkan dalam bentuk pendapatan nasional. Pertumbuhan Ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan ekonomi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya (Jhingan, 2016).

Pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memperlihatkan peningkatannya dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tantangan yang ingin dicapai oleh suatu daerah (Dewi et Al, 2012).

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan nasional dan wilayah. Wilayah yang dimaksud disini dapat berbentuk provinsi, kabupaten, atau kota. Tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sampai saat ini masih merupakan target utama dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di samping pembangunan fisik dan sosial. Sedangkan, target pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata sangat bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah (Suweni, 2020). Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung berdasarkan nilai Produk domestik regional bruto menurut harga konstan yang dihasilkan oleh daerah setiap tahun dan bisa juga dengan melihat angka laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun.

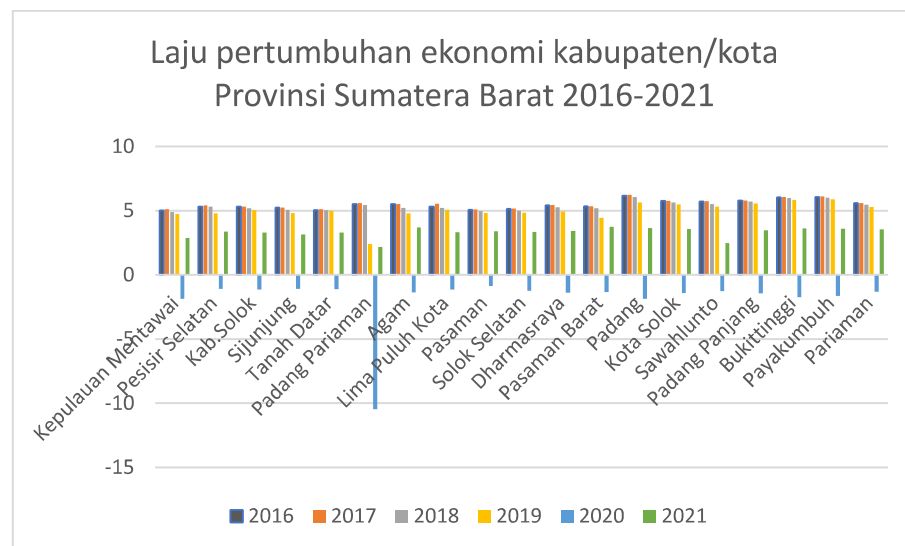
Berdasarkan ketetapan MPR No.XV/MPR/1998, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 1 Undang - undang No.32 tahun 2004. Dengan adanya hal ini maka diharapkan terjadinya percepatan ekonomi dan mempercepat tujuan pembangunan nasional. Adanya otonomi daerah tentunya juga akan memacu daerah untuk mampu mengelola daerahnya sendiri agar mampu menjadi daerah yang mandiri dan menjadi sumber bagi pembangunan nasional. Dengan adanya rangsangan yang memacu daerah inilah yang akan membuat daerah berupaya meningkatkan potensinya masing-masing sehingga mampu menimbulkan

suatu percepatan ekonomi. Maka sangatlah jelas bahwa otonomi daerah memiliki peran yang sangat penting terhadap pembangunan suatu daerah (Saraswati, 2018).

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal ini merupakan prinsip dari otonomi daerah. Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah semakin meningkat dalam era otonomi daerah. Hal ini cukup logis, karena dalam era otonomi tersebut masing-masing daerah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya guna mendorong perbaikan kemakmuran masyarakat setempat. Karena itu, pembahasan tentang struktur dan faktor pertumbuhan ekonomi daerah akan sangat penting artinya bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah biasanya ditunjukkan dengan melihat produksi barang dan jasa yang diukur dengan produk domestik regional Bruto (PDRB) dan dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota yang juga ikut serta dalam desentralisasi fiskal di Indonesia dan merasakan dampak otonomi daerah. Sistem otonomi wilayah menimbulkan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengendalikan rumah tangganya sendiri sehingga setiap daerahnya berhak menentukan kondisi daerah termasuk pertumbuhan ekonominya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan pada tahun 2016 – 2021 . Disajikan pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 -2021

Berdasarkan data dari badan pusat statistik pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat dalam periode tahun 2016-2021. Pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2016 tumbuh 5,27%. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat sebesar 5,29% disebabkan oleh: 1) membaiknya kinerja ekspor luar negeri , 2) meningkatnya kinerja lapangan usaha pertanian, 3) kinerja jasa pendidikan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2018 tumbuh 5,14 % , melambat dibanding tahun 2017 sebesar 5,29 % disebabkan oleh: 1) penurunan pada hampir seluruh komponen pengeluaran2) meningkatnya kontribusi kinerja lapangan usaha pertanian dari tahun sebelumnya

3) lapangan usaha industri pengolahan yang mengalami kontraksi. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melambat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,05%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini tidak hanya terjadi di Provinsi Sumatera Barat tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada tahun 2020 terjadi guncangan ekonomi yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang berlangsung dari tahun 2020 dan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, begitu juga pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Barat. Pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga tahun 2022 dan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki sifat yang dinamis dan cenderung menurun terlihat dari turunnya angka rata-rata Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat ditinjau dari kabupaten/kota juga masih terdapat begitu banyak Kabupaten/Kota yang mengalami stagnan pada pertumbuhan ekonominya, dan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2017 – 2021. Seperti Kota Padang yang menjadi kota dengan Pertumbuhan Ekonomi tertinggi di Provinsi Sumatera Barat dari 6,17% pada tahun 2016 menjadi 5,64% tahun 2019, Kota Payakumbuh dari 6,08% pada tahun 2016 menjadi 5,89% pada tahun 2019, Kota Bukittinggi dari 6,05% pada tahun 2016 dan menjadi 5,84% pada tahun 2019 dan di berbagai kabupaten/kota lainnya yang juga mengalami penurunan ekonomi di tahun 2019. Pada tahun 2020

hingga 2021 pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan di akibatkan Pandemi Covid-19.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, setiap daerah membutuhkan dana yang tidak hanya bersumber dari APBN saja, akan tetapi juga bersumber dari pendapatan daerah itu sendiri. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi yang ada menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam penciptaan kemandirian daerah, Pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah (Suandi, 2016).

Pendapatan asli daerah sangat penting dalam membangun perekonomian suatu daerah karena dana ini adalah milik pemerintah daerah itu sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengelola dana tersebut untuk kepentingan pembangunan. Pemerintah daerah pun memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang berasal dari pendapatan asli daerah, dimana dana tersebut diperoleh dari masyarakat maka masyarakat berhak mendapatkan kelayakan dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di daerah tersebut (Nurjanah, 2018).

Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu pendapatan asli daerah tersebut. Sejalan dengan teori pertumbuhan endogen teori Keynes yang menyatakan bahwa untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari besaran nilai PDRB diutamakan faktor produksi dari endogen atau di dalam daerah itu sendiri termasuk itu PAD. Dengan begitu dapat disimpulkan jika PAD meningkat kemungkinan besar akan berdampak pula pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Nasution, 2018). Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan, pendapatan asli daerah diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan dengan adanya otonomi daerah (Mappa, 2021).

Sistem desentralisasi fiskal juga diberlakukan di Sumatera Barat, pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat dari tahun 2016 sebesar Rp 1.964.148.975,80 , tahun 2017 sebesar Rp 2.134.010.519,50, ke tahun 2019 Rp. 2.328. 432.873,68. Peningkatan pendapatan asli daerah ini menggambarkan Pemkab/Pemko Sumatera Barat memiliki kemampuan menggali potensi pendapatan di setiap daerah di Sumatera Barat. Peningkatan PAD akan merangsang pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya ke publik sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah adalah terciptanya kemandirian daerah dalam pengurusan daerahnya sendiri sebagai daerah otonom dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk mewujudkan kemandirian daerah, maka setiap tahunnya Pemerintah Pusat mengalokasikan transfer dana ke daerah-daerah di seluruh Indonesia dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian (Fusanto, 2018).

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah” menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

Dana Alokasi Umum (DAU) dari segi jumlah yang diterima pemerintah provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016 sampai tahun 2020. DAU tahun 2016 sebesar Rp1.261.915.864,00, lalu tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp2.014.646.639,00, tahun 2018, Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki nilai yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp2.014.646.639,00, tahun 2019 sebesar Rp2.076.398.191,00. Berdasarkan data realisasi pendapatan pemerintah provinsi Sumatera Barat menurut jenis pendapatan, nilai realisasi dana alokasi umum mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2019.

Selain dana alokasi umum (DAU), yang termasuk dalam komponen dana perimbangan yaitu adalah dana alokasi khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus ini adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membantu membiayai kegiatan khusus sebagai urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana alokasi khusus dari segi jumlah yang diterima kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. DAK tahun 2016 sebesar Rp1.180.338.806,00 , tahun 2017 sebesar Rp1.699.580.667,86, tahun 2018 sebesar Rp1.784.401.030,48, tahun 2019 sebesar Rp1.844.831.704,01. Berdasarkan data realisasi pendapatan pemerintah provinsi Sumatera Barat menurut jenis pendapatan , nilai realisasi dana alokasi khusus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019.

Sumber – sumber penerimaan daerah berupa PAD , dan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP pada tingkat nasional dan kenaikan PDRB dalam lingkup daerah(Putri, 2016). Banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tercapai dapat menilai keberhasilan suatu daerah dalam mengendalikan kegiatan ekonominya dan melaksanakan otonomi daerah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka judul dalam penelitian ini adalah “ Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka yang menjadi identifikasi masalah adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 -2019 mengalami penurunan.

2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan.
3. Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan.
4. Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat yang mengalami Peningkatan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka masalah dibatasi sebagai berikut :

1. Ruang lingkup permasalahan hanya berfokus pada pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Penelitian ini dibatasi hanya pada tahun 2016 sampai tahun 2019.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019 ?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019 ?

4. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019 ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 -2019.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 -2019.
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 -2019.
4. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi , terutama dalam hal pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dalam menulis karya ilmiah dan memperdalam wawasan yang berhubungan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum

(DAU) , dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

- b. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pembangunan yang ada di daerah, sehingga masyarakat bisa ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan.